

ABSTRAK

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura. Kabupaten ini memiliki daya tarik dan daya saing pariwisata yang tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten lain di Pulau Madura. Akan tetapi, hingga sekarang Kabupaten Sampang belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kabupaten/Kota (RIPPARKAB).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan metode pendekatan berupa metode pendekatan fakta (*fact approach*). Sedangkan untuk sumber data berasal dari data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan, lalu metode analisisnya dilakukan dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam mengatur pariwisata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan dari 11 ketentuan pasal tersebut sudah terlaksana. Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB Sampang 2022-2037 telah menerapkan prinsip-prinsip *blue economy*. Pernyataan tersebut didasari oleh analisa yang dilakukan serta melihat fakta-fakta pelaksanaannya di Pantai Lon Malang, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah.

Kata kunci: pariwisata – wewenang – *blue economy*

ABSTRACT

Sampang Regency is one of the regencies located on Madura Island. This district has tourism attractiveness and competitiveness that is not inferior to other regencies on Madura Island. However, until now Sampang Regency does not yet have a Regional Regulation on Regency/City Development Master Plans (RIPPARKAB).

The type of research used is empirical research, a study that uses empirical facts with an approach method in the form of a fact approach. As for the source of data derived from primary data obtained directly and secondary data obtained indirectly. Data collection techniques through interview techniques (interview) and literature study, then the method of analysis is carried out by descriptive analysis method.

The results of the study show that the implementation of the authority of the Regional Government of Sampang Regency in regulating tourism in accordance with the provisions of Article 30 of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism has been effective. This is evidenced from the 11 provisions of the article that have been implemented. The draft Regional Regulation on RIPPARKAB Sampang 2022-2037 has implemented blue economy principles. This statement is based on the analysis carried out and looking at the facts of its implementation at Lon Malang Beach, Bira Tengah Village, Sokobanah District.

Keywords: tourism – authority – blue economy